



## PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PELATIHAN SISTEM LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BERBASIS *TEMPORARY SPACE TRANSACTION METHOD*

Andreani Hanjani, Parwoto, Sigit Widadi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Kasihan Bantul, Yogyakarta  
Email: [andreani@umy.ac.id](mailto:andreani@umy.ac.id)

### ABSTRAK

Tujuan Program Pengabdian ini adalah untuk membantu sistem pelaporan keuangan Lembaga Keuangan Mikro. Mitra Usaha dalam program ini adalah LKM Binangun Ngentakrejo dan LKM Binangun Brosot. Permasalahan yang dihadapi oleh kedua mitra tersebut adalah kegagalan dalam implementasi teknologi tepat guna berupa rekayasa teknologi informasi untuk melakukan penyajian laporan keuangan. Metode pelaksanaan pengabdian ini yaitu: 1) Survey dengan melakukan pengamatan dan analisis tentang Bagan alir data transaksi, Komponen laporan keuangan, Model rekapitulasi, Neraca dan pajak, Laporan arus kas, dan sebagainya; 2) Membuat sistem database; 3) Membuat antarmuka (interface) aplikasi keuangan LKM, 4) Melakukan implementasi sistem jaringan komputer;

5) Pelatihan penggunaan perangkat lunak hasil implementasi bagi pengelola LKM. Hasil program ini adalah: 1) terwujudnya "*temporary space transaction method*" dalam aplikasi simpan pinjam, sehingga transaksi angsuran kredit dapat diterima dalam jumlah berapapun dan pelatihan penggunaan perangkat lunak untuk mengelola data keuangan bagi pengelola LKM; 2) Pelatihan penggunaan perangkat lunak hasil implementasi. Program ini diharapkan mampu memfasilitasi mitra untuk mempermudah melakukan penyajian laporan keuangan. Luaran dari program ini adalah Publikasi ilmiah pada jurnal Berdikari (Jurnal Pembangunan Pedesaan & Perkotaan)

**Kata kunci:** Pemberdayaan, Pelatihan, *Temporary Space Transaction Method*, Lembaga Keuangan Mikro

### PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia mulai berkembang diilhami oleh keberhasilan Muhammad Yunus dalam mengembangkan LKM di Banglades yang terkenal dengan Grameen Bank (GB). Secara nasional Lembaga Keuangan Mikro diatur dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 2013. Sedangkan di Kabupaten Kulon Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pendirian Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan SK Bupati Nomor

22 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (BD No.15 Seri E) yang diubah dengan Perbup 42 Tahun 2006. Dalam peraturan bupati tersebut dinyatakan bahwa lembaga keuangan mikro dimungkinkan menjadi badan usaha milik pemerintah desa (BUMDes) dengan format penamaan "LKM –Nama Desa", sebagai contoh LKM Binangun.

LKM Binangun di wilayah Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu lembaga keuangan informal yang memprioritaskan nasabah kelompok usaha mikro yang tidak terlayani oleh sistem perbankan formal. Pada bulan Agustus 2013 LKM Binangun di Kabupaten Kulon Progo menjadi lembaga berbadan hukum karena seluruh LKM Kulon Progo memiliki akta sebagai BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan Lurah Desa sebagai penanggung jawabnya. Pelayanan LKM Binangun tidak menggunakan pola pelayanan bank konvensional, namun menerapkan pelayanan dengan pendekatan kelompok, tidak mensyaratkan kolateral dan tidak menerapkan persyaratan administratif formal yang menyulitkan.



Sejak berdirinya LKM Binangun telah mengalami dua kali kegagalan dalam implementasi teknologi tepat guna berupa rekayasa teknologi informasi untuk melakukan penyajian laporan keuangan. Menurut penjelasan salah satu anggota Dewan Pembina LKM, kegagalan pertama terjadi saat Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo mengadopsi sistem informasi keuangan milik PD Bank Pasar senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Kegagalan terjadi akibat sistem informasi keuangan milik PD Bank Pasar tidak mampu melakukan sinkronisasi data transaksi keuangan dengan jumlah transaksi mencapai ribuan transaksi sejak awal LKM berdiri. Kegagalan kedua terjadi pada saat Pemerintah Daerah melakukan pengadaan perangkat lunak pengelolaan data keuangan LKM berbasis web yang disusun dalam sistem basis data terpadu untuk seluruh LKM se-Kabupaten Kulon Progo. Kegagalan terjadi karena faktor ketidakpercayaan pengelola LKM pada aspek kerahasiaan, otoritas data keuangan dan sistem yang tidak fleksibel dalam pengaturan besaran bunga kredit, bunga simpanan, fleksibilitas angsuran kredit dan fleksibilitas pengaturan persentase pembagian keuntungan antara Pengelola LKM dan Pemerintah Desa, mengingat aturan mengenai beberapa hal tersebut sangat beragam karena petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Dewan Pembina LKM hanya mengatur kisaran nilai pada variable yang dimaksud. Adapun Rumusan masalah adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana teknologi tepat guna untuk mempermudah mengelola data keuangan; 2) Bagaimana model pelatihan penggunaan perangkat lunak hasil implementasi.

Berdasarkan masalah diatas maka dilaksanakan program pelatihan dan pemberdayaan sistem pelaporan keuangan LKM Binangun Desa Ngentakrejo dan LKM Binangun Desa Brosot. Program yang dilaksanakan adalah "*temporary space transaction*" dalam aplikasi simpan pinjam sehingga transaksi angsuran kredit dapat diterima dalam jumlah berapapun. Luaran dari pengabdian ini adalah publikasi jurnal Berdikari.

## **METODE PELAKSANAAN**

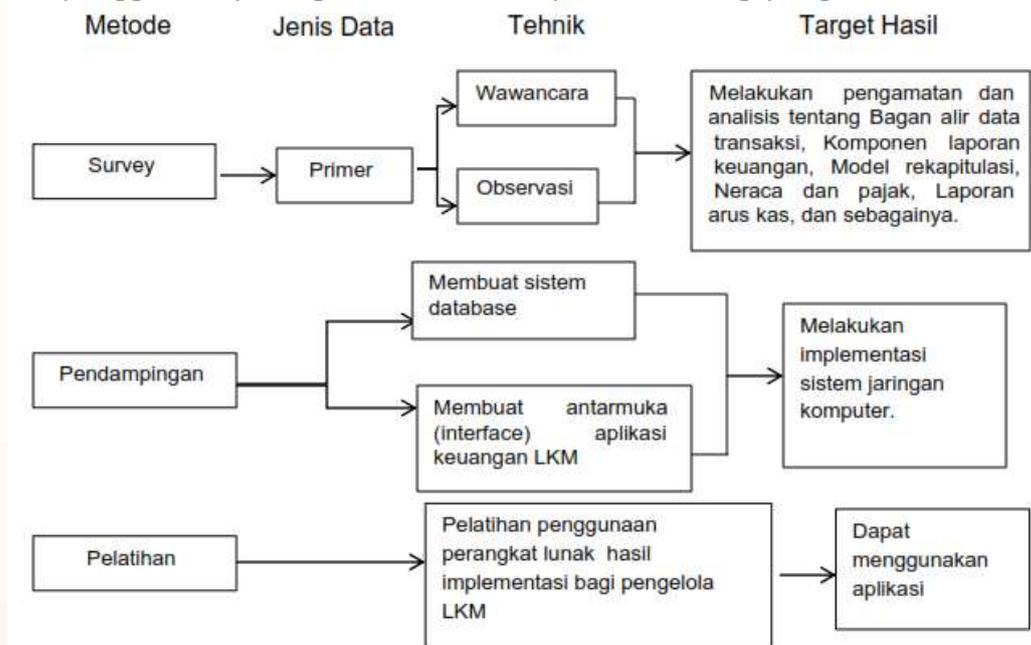
LKM Binangun Ngentakrejo dan LKM Binangun Brosot adalah lembaga perbankan kecil jika dilihat dari aspek jumlah nasabah dan besaran pagu nilai kredit. Akan tetapi dalam pengelolaan keuangan tidak jauh berbeda dengan lembaga perbankan seperti BPR maupun PD Bank Pasar. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkandari hasil analisis Pedoman Penyajian Laporan Keuangan LKM yang disusun oleh Dewan Pembina LKM Binangun serta berdasarkan analisis format laporan keuangan LKM mitra pada tahun sebelumnya.

Program pemberdayaan pada LKM Binangun Ngentakrejo dan LKM Binangun Brosot memprioritaskan solusi masalah pada sistem pendukung pelayanan nasabah dan sistem pelaporan keuangan. Sistem pendukung yang diimplementasikan berupa:

1. Pembuatan perangkat lunak *multi user* yang digunakan untuk mengelola data keuangan LKM dan memberikan desain arsitektur teknologi informasi yang bersifat tepat guna (sederhana, murah, mudah ,berdaya guna) serta memiliki keluwesan sehingga dapat mengakomodasi transaksi simpan pinjam yang tercantum dalam permasalahan mitra. Melaksanakan program "*temporary space transaction method*" dalam aplikasi simpan pinjam, sehingga transaksi angsuran kredit dapat diterima dalam jumlah berapapun. Adapun tahapan implementasi perangkat lunak sebagai Survey
  - a. Melakukan pengamatan dan analisis tentang Bagan alir data transaksi, Komponen laporan keuangan, Model rekapitulasi, Neraca dan pajak, Laporan arus kas, dan sebagainya.
  - b. Membuat sistem database
  - c. Membuat antarmuka (interface) aplikasi keuangan LKM
  - d. Melakukan implementasi sistem jaringan komputer.



## 2. Pelatihan penggunaan perangkat lunak hasil implementasi bagi pengelola LKM



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Program

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Teknologi Tepat Guna Untuk Mempermudah Mengelola Data Keuangan

Lembaga Keuangan Mikro berperan membantu pemerintah meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil di pedesaan (Agustin, Atut Frida, 2011). Pelaporan keuangan Lembaga Keuangan Mikro harus sesuai dengan SEOJK Nomor 29/SEOJK.05/2015. Untuk mempermudah pelaporan keuangan dibutuhkan system yang tepat. Menurut Supriyanto, Aji (2005) sistem merupakan kumpulan elemen, komponen, atau subsistem yang saling berintegrasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu dibuatlah Program “*temporary space transaction method*” yang mana memiliki fitur umum seperti formulir entri data pada umumnya. Selain itu produk teknologi tepat guna yang dibangun memiliki fitur aplikasi yang spesifik sebagai berikut:

- Formulir entri saldo awal dan pemeriksaan keseimbangan neraca yang diisikan sebelum menjalankan operasi apapun di aplikasi LKM.
- Formulir angsuran yang fleksibel, sehingga memudahkan nasabah dan operator mengisikan nilai angsuran, meskipun besar nilai angsuran tidak sama dengan nilai yang ditentukan pada tiap tahap angsuran pinjaman.
- Integrasi nilai hasil dari perhitungan jurnal penyesuaian yang otomatis masuk ke dalam akun transaksi dan perubahan ekuitas tanpa melakukan perhitungan terpisah dari proses perhitungan saldo laporan keuangan.
- Integrasi proses transaksi biaya pencairan dana pinjaman, yaitu potongan simpanan wajib, potongan provisi administrasi, potongan meterai dan setoran simpanan wajib pada proses transaksi pencairan kredit/pinjaman.
- Integrasi proses perhitungan utang bunga tabungan

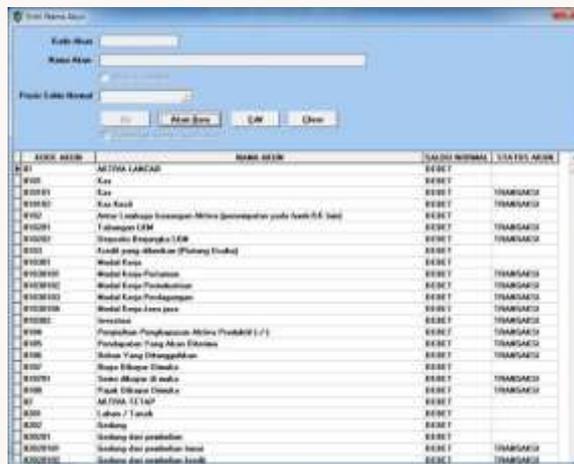
Teknis dalam antarmuka aplikasi LKM dijelaskan melalui gambar sebagai berikut:

- a. Program utama dan struktur menu aplikasi LKM



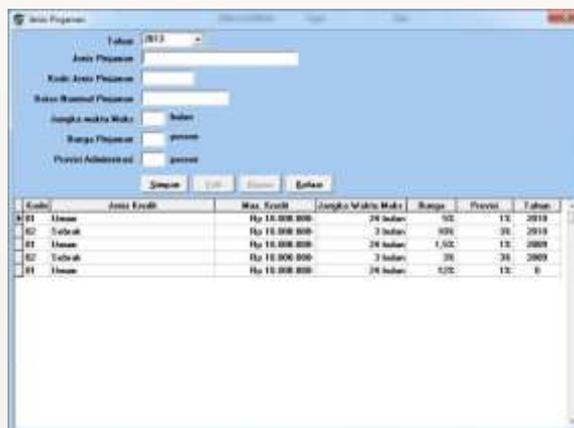
Gambar 2. Menu Utama Aplikasi LKM

- b. Halaman entri akun



Gambar 3. Halaman Entri Akun

- c. Halaman entri jenis pinjaman



Gambar 4. Halaman Entri Jenis Pinjaman

d. Halaman entri jenis jaminan kredit/agunan pinjaman



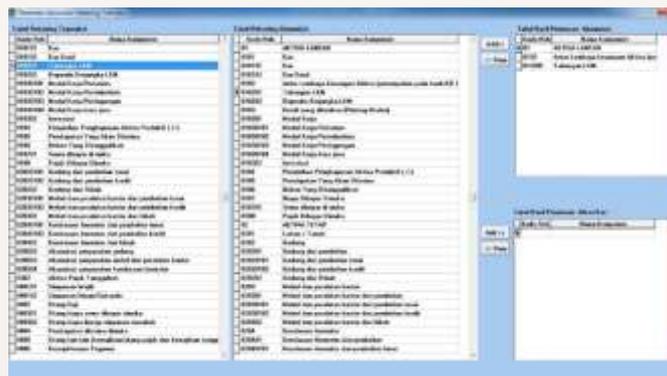
Gambar 5. Halaman Entri Jenis Jaminan

e. Halaman entri jenis tabungan



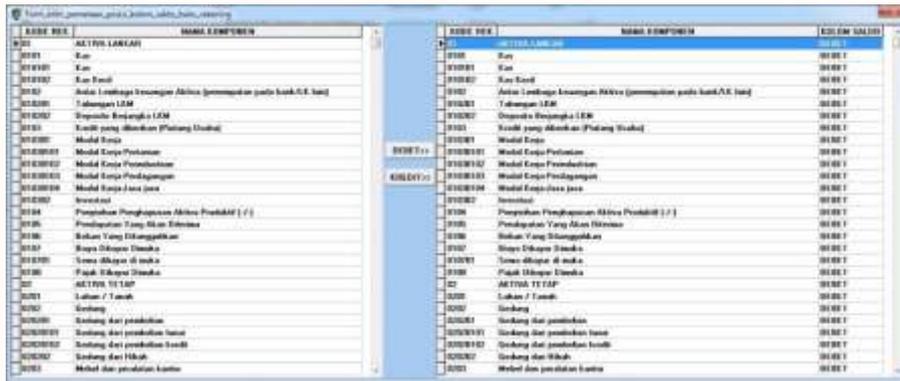
Gambar 6. Halaman Entri Jenis Tabungan

f. Halaman pemetaan akumulasi akun transaksi



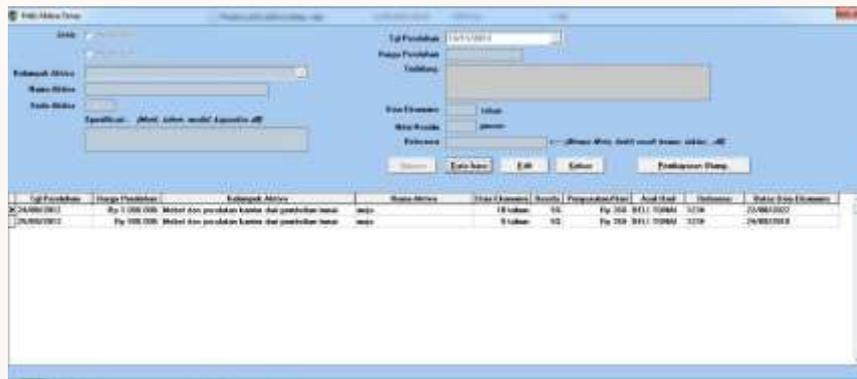
Gambar 7. Halaman Pemetaan Akumulasi Akun Transaksi

g. Halaman pemetaan posisi DEBIT atau KREDIT pada akun transaksi



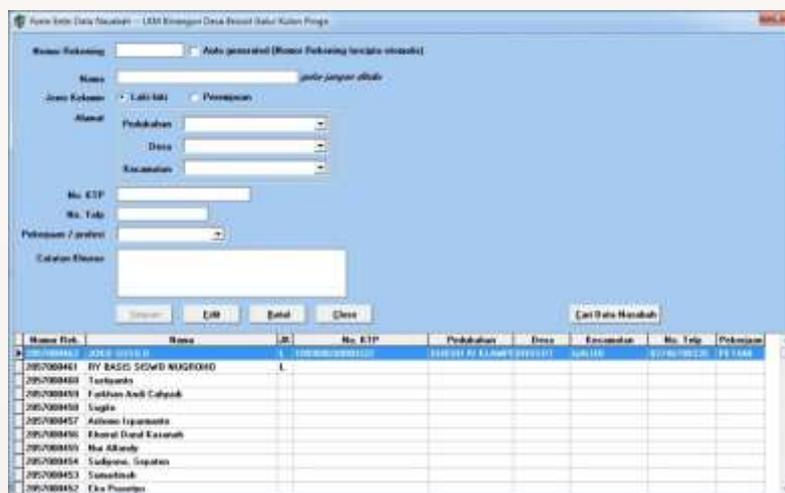
Gambar 8. Halaman Pemetaan Posisi Debet atau Kredit pada Akun Transaksi

h. Halaman entri aktiva tetap



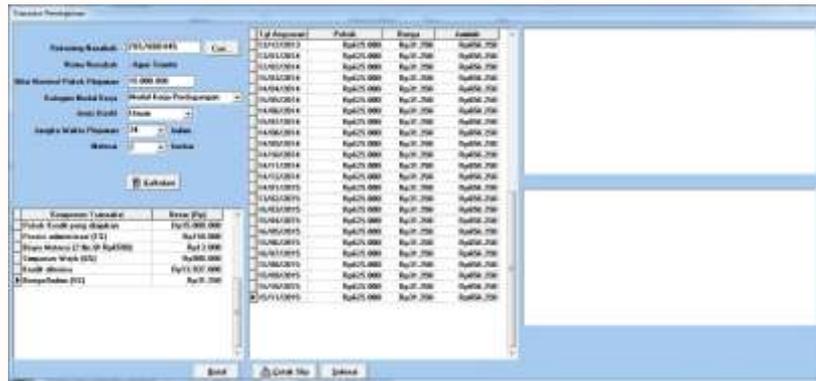
Gambar 9. Halaman Entri Aktiva Tetap

i. Halaman entri data nasabah



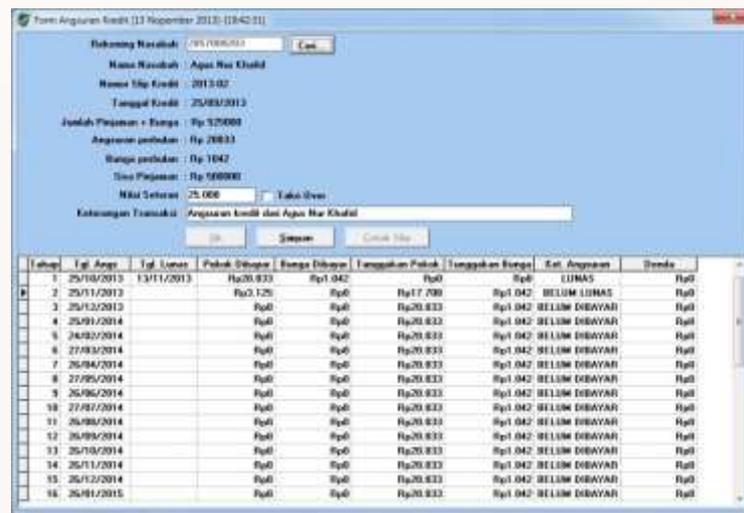
Gambar 10. Halaman Entri Data Nasabah

j. Halaman pencairan kredit



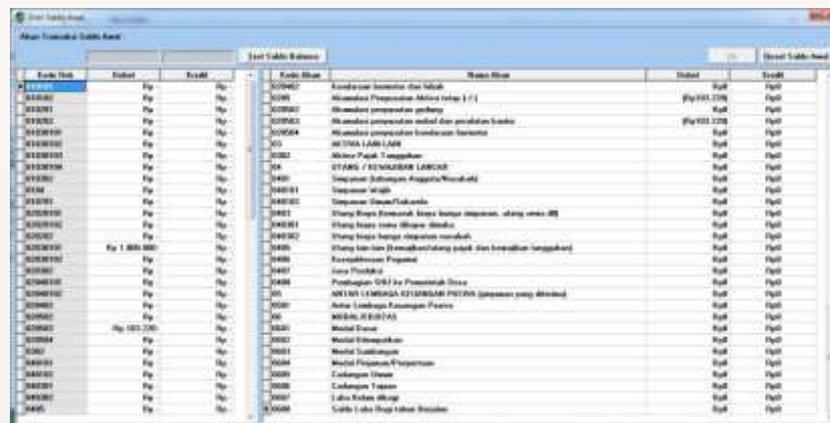
Gambar 11. Halaman Pencairan Kredit

i. Halaman angsuran kredit



Gambar 12. Halaman Angsuran Kredit

j. Halaman entri saldo awal



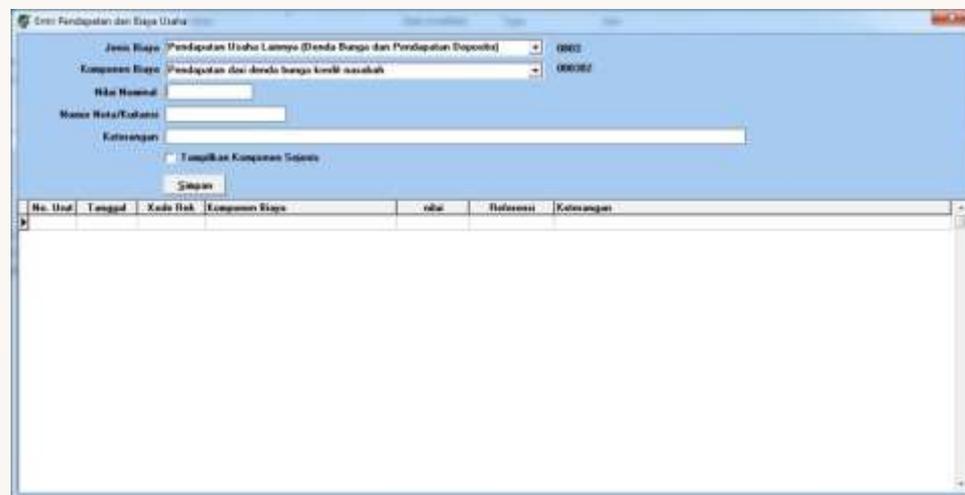
Gambar 13. Halaman Entri Saldo Awal

k. Halaman entri periode laporan atau periode tahun buku



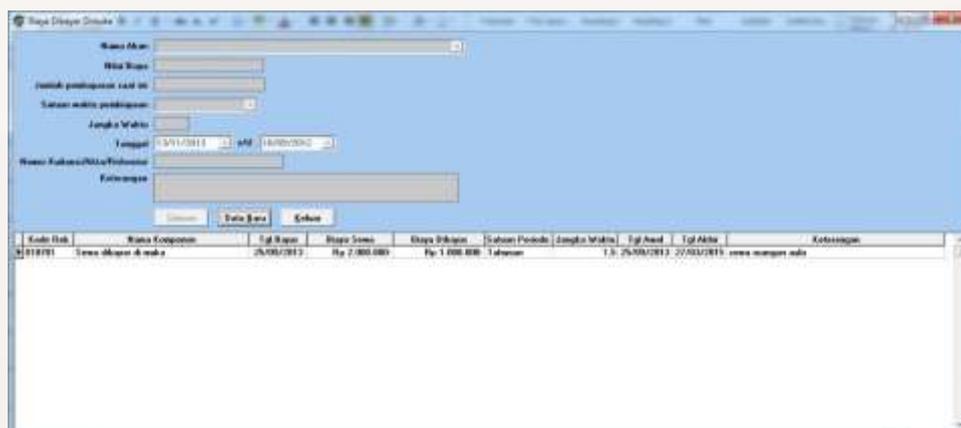
Gambar 14. Halaman Entri Tahun Buku

l. Halaman transaksi Pendapatan dan Biaya Usaha



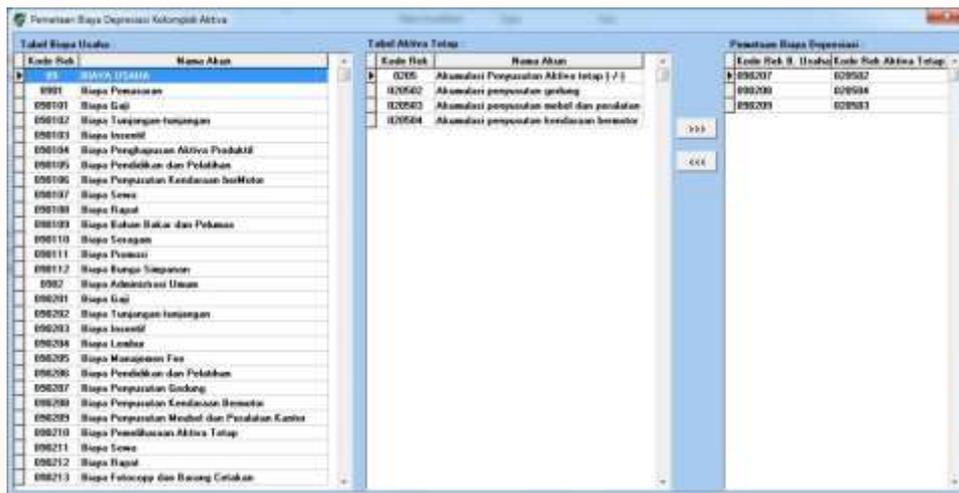
Gambar 15. Halaman Entri Transaksi Pendapatan dan Biaya

m. Halaman transaksi Biaya Dibayar Dimuka



Gambar 16. Halaman Transaksi Biaya Dibayar Di Muka

n. Halaman pemetaan akumulasi biaya depresiasi aktiva tetap

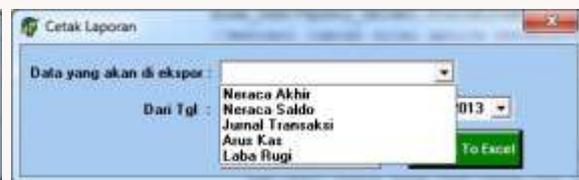


Gambar 17. Pemetaan Akun Akumulasi Biaya Depresiasi Aktiva Tetap

o. Halaman impor laporan keuangan ke format MS Excel

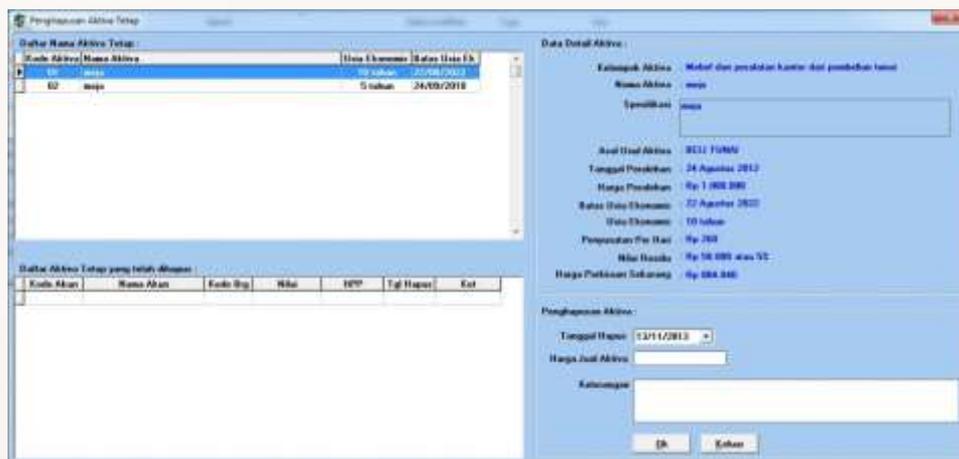


Gambar 18.a Pilihan Jenis Laporan



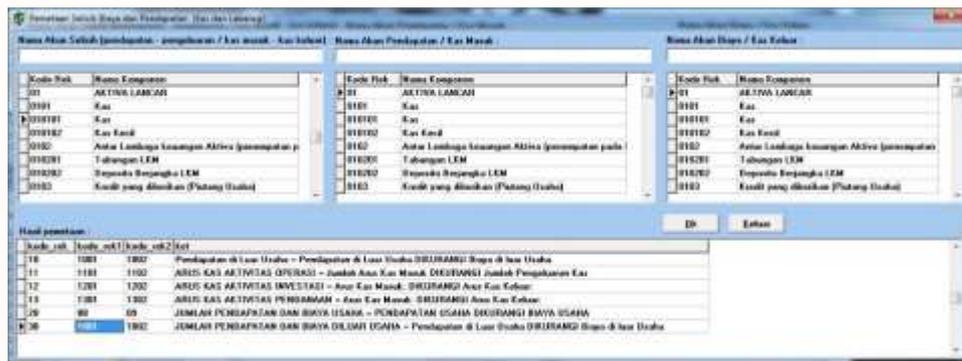
Gambar 18.b Proses Ekspor Laporan Neraca

p. Halaman penghapusan aktiva tetap



Gambar 19. Halaman Penghapusan Aktiva Tetap

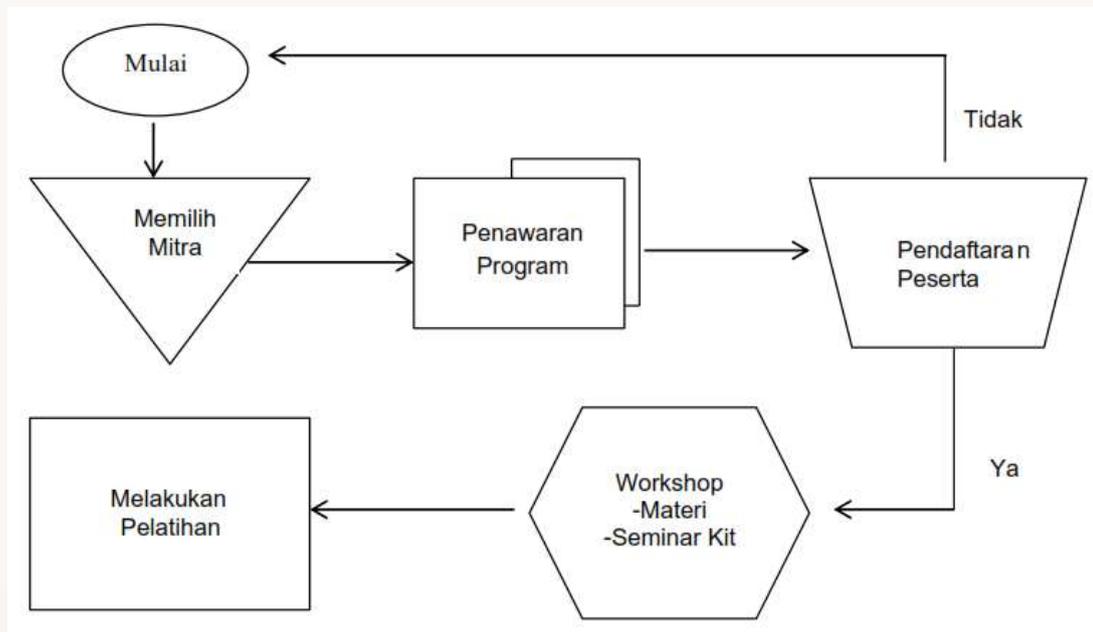
q. Halaman pemetaan akun selisih biaya dan pendapatan



Gambar 20. Halaman Pemetaan Akun Selisih Biaya dan Pendapatan

## 2. Model Pelatihan Penggunaan Perangkat Lunak Hasil Implementasi

Faktor terpenting pengimplementasian teknologi komputer adalah sumber daya manusia sebagai pengguna sekaligus operator dari sistem berbasis komputer tersebut (Hernawan Sulistyanto, 2017). Oleh karena itu pengurus LKM Binangun Ngentakrejo dan LKM Binangun Brosot diberikan pelatihan penggunaan perangkat lunak hasil implementasi agar paham mengoperasikannya



Gambar 21. Model Pelatihan



Gambar 22. Foto-Foto Kegiatan Pelatihan

## KESIMPULAN

Program pemberdayaan dan pelatihan sistem pelaporan keuangan LKM Binangun Ngantakrejo dan LKM Binangun Brosot mampu membantu mempermudah mengelola data keuangan. Dengan metode pelaksanaan yang memberikan desain arsitektur teknologi informasi yang bersifat tepat guna (sederhana, murah, mudah, berdaya guna) serta memiliki keluwesan sehingga dapat mengakomodasi transaksi simpan pinjam yang tercantum dalam permasalahan mitra.

## SARAN

Dari semua program diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemasukan data transaksi ke aplikasi LKM sebaiknya dilakukan secara *real time*.
2. Untuk mengoptimalkan aspek manfaat perangkat lunak, sebaiknya LKM mitra selalu berkonsultasi dengan tim pelaksana minimal selama satu periode tahun buku.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pemerintah Desa Ngantakrejo dan LKM Binangun Brosot
2. Pengurus LKM Binangun Ngantakrejo dan LKM Binangun Brosot



## DAFTAR PUSTAKA

Agustin, Atut Frida. (2011). Jurnal Ekonomi Pembangunan, 9(2). Hernawan Sulistyanto. 2017. WARTA LPM, 20(2). SEOJK Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro

SK Bupati Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Lembaga Keuangan Mikro

Supriyanto, Aji. (2005). Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: Salemba

Undang-Undang No. 01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro